

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001 dan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004, dijelaskan bahwa definisi dari otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Sukhemi (2011) mengungkapkan tujuan utama dengan adanya otonomi daerah adalah untuk tercapainya *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai *Good Government Governance* ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah daerah otonom, salah satunya transparansi laporan keuangan. Masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan agar dapat tercapai *Good Government Governance*. Sejauh mana transparansi dalam pemerintah diterapkan dapat dinilai dari kemudahan untuk mengakses informasi dan tersedia atau tidaknya sebuah informasi.

Keseriusan pemerintah dalam rangka pewujudan *Good Government Governance* baik terhadap pemerintah pusat maupun daerah tercermin dari dikeluarkannya paket undang-undang yang mengatur aspek keuangan pemerintah. Meliputi UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sebuah laporan keuangan agar dapat dikatakan transparan dalam pengelolaannya harus didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Dalam PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, mengungkapkan tujuan penyajian laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengguna tidak hanya sebatas masyarakat tetapi juga pihak lain yang berkepentingan seperti investor dan LSM sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya kepentingan *stakeholder* ini maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan sangatlah penting.

Pemerintah daerah sendiri telah sadar akan pentingnya sebuah transparansi. Terbukti dari beberapa daerah yang telah membuat perda yang berkaitan dengan transparansi sebelum diterbitkannya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah mudah dikarenakan belum adanya sanksi yang diberikan untuk pelaksanaan transparansi oleh masing-masing pemerintah daerah melalui perda. (Ridha dan Basuki, 2012) menyatakan butuh komitmen manajemen yang kuat untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan.

Faktor eksternal dan internal pemerintah secara langsung dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. (Frumkin dan Galaskiewicz dalam Ridha dan Basuki, 2012) tekanan institusional cenderung berkembang di mana pengukuran kontrol yang lemah atau tidak tepat, yaitu dimana akuntabilitas rendah. Apabila akuntabilitas dalam sebuah organisasi rendah dapat disimpulkan keinginan organisasi publik untuk menerapkan

transparansi pelaporan keuangan juga rendah. Rendahnya keinginan organisasi dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan akan berdampak kurang baik untuk organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Dampak yang kurang baik seperti penyalahgunaan wewenang, distorsi dalam alokasi sumber daya, ketidakadilan bagi masyarakat bahkan menyuburkan praktik korupsi. Indonesia sendiri masih termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, dapat disimpulkan masih rendahnya penerapan transparansi pelaporan keuangan di Indonesia.

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang berkaitan dengan transparansi di tingkat pemerintah daerah. Khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) peneliti ingin mencari bukti empiris hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap transparansi. Pemerintah daerah Provinsi DIY setiap bulan bahkan setiap hari mampu memperoleh pendapatan yang relatif besar. Pendapatan yang didapat dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan tersebut akan berdampak pada APBD dan pembangunan di Provinsi DIY. Maka dari itu dibutuhkan sebuah transparansi oleh pemda terhadap masyarakat agar tidak terjadi kecurigaan oleh masyarakat.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah tekanan eksternal. Tekanan eksternal dinilai berbanding lurus dengan transparansi pelaporan keuangan. Semakin besarnya tekanan eksternal yang didapat oleh suatu organisasi, cenderung membuat organisasi semakin menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Tuntutan

dari masyarakat moderen akan transparansi pemerintah semakin besar. Adanya tekanan eksternal tersebut membuat pemerintah berupaya meningkatkan transparansi agar masyarakat tidak beranggapan adanya praktik korupsi di dalam pemerintah.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan dinilai mampu mempengaruhi dan juga berbanding lurus dengan transparansi pelaporan keuangan. Adanya ketidakpastian lingkungan yang disebabkan seperti peraturan yang cepat berganti, membuat pemerintah gagal dalam penerapan transparansi dan akhirnya meniru organisasi yang dinilai berhasil.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah komitmen manajemen. Adanya komitmen dalam sebuah organisasi cenderung berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan hukum tersebut maka penerapan transparansi dalam organisasi akan dapat tercapai.

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang memiliki latar belakang tentang pengelolaan keuangan akan menjauhkan dari ketidak pahaman organisasi atas sistem akuntansi. Adanya SDM dibidang akuntansi tersebut maka transparansi pelaporan keuangan dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL,**

KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, KOMITMEN MANAJEMEN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN". Penelitian ini pada dasarnya mereplikasi penelitian Ridha dan Basuki (2012), dengan menambah 1 variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia dengan tahun yang berbeda. Variabel sumber daya manusia dinilai mampu mempengaruhi penerapan transparansi dalam pemerintah daerah. Dengan menambah 1 variabel independen dalam penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. Batasan Masalah Penelitian

Faktor-faktor yang dinilai mampu mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan dan di uji dalam penelitian ini adalah tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan sumber daya manusia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah provinsi DIY?
2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah provinsi DIY?
3. Apakah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah provinsi DIY?

4. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah provinsi DIY?

D. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah dilakukan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah Provinsi DIY.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah Provinsi DIY.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah Provinsi DIY.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan untuk peneliti.
 - b. Menambah referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Bidang Praktik

- a. Memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
- b. Menambah literatur mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan di sektor publik.
- c. Memberikan pemahaman terhadap kebijakan penerapan pelaporan keuangan. Dapat memberikan masukan dan gambaran bagi kepala daerah dalam meningkatkan kebijakan dan kinerja.